



PENGADUAN TERPADU PERIZINAN & INVESTASI

LAPORAN SEMESTER II PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN TAHUN 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Perizinan Gardu Pasti di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Periode Juli sampai dengan Desember 2022.

Laporan ini merupakan dokumen gambaran secara komprehensif mengenai jumlah pengaduan yang masuk dan di tindak lanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. Pengaduan Perizinan yang masuk di terima lewat “GARDU PASTI” yaitu “PENGADUAN TERPADU PERIZINAN DAN INVESTASI” sebagai bentuk layanan penyaluran aspirasi masyarakat dan juga sebagai bahan evaluasi perbaikan atas layanan yang diberikan di Periode bulan Juli s.d Desember 2022.

Demikian Laporan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan gambaran data dan informasi terhadap layanan pengaduan masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Purwakarta, 31 Desember 2022

Koordinator Substansi Pengendalian

Sub Koordinator Substansi Pengaduan

Rd. Heri Lukman Yusup, SH
NIP. 19651017 199302 1 001

Lingga Kencana, S.Pd
NIP. 19790201 200901 2 001

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta

Hariman Budi Anggoro, ST, MT
NIP. 19790605 200501 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I

PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. MAKSUD DAN TUJUAN..... 2

 C. DASAR HUKUM..... 2

 D. RUANG LINGKUP 3

BAB II

GAMBARAN UMUM 4

 A. PROFIL 4

 1. Visi Dan Misi..... 4

 2. Tugas Pokok Dan Fungsi 4

 3. Maklumat 5

 4. Motto..... 5

 5. Susunan Organisasi 5

 6. Kewenangan 5

 B. SUMBER DAYA..... 6

 1. Sumber Daya Manusia 6

 2. Anggaran 7

 3. Sarana Dan Prasarana 7

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN 9

 A. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN 9

 1. Status Penanganan Pengaduan Perizinan 9

 2. Penanganan Pengaduan Perizinan Per Saluran Pengaduan 9

 3. Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan Tahun 2022..... 11

 B.HAMBATAN..... 15

 C.UPAYA PENYELESAIAN..... 15

BAB III

PENUTUP..... 16

 A. KESIMPULAN 16

 B. SARAN..... 16

DOKUMENTASI KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN 17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh layanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Berbeda dengan perizinan berusaha sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang saat ini berlaku (OSS Versi 1.1), sistem perizinan berusaha akan bertransformasi menjadi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA), sesuai dengan yang diatur dalam Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).

Beda dengan sistem OSS 1.1 yang tidak mendasarkan perizinan pada risiko dan skala kegiatan usaha, sistem OSS RBA ini nantinya akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha. Tingkatan risiko Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, maka terdapat klasifikasi risiko kegiatan usaha, diantaranya (Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021):

- Kegiatan Usaha dengan tingkat risiko rendah;
- Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
- Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
- Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Skala usaha Selain penetapan tingkat risiko, perizinan berusaha juga dilakukan dengan penetapan peringkat skala kegiatan usaha, yang meliputi (Pasal 35 ayat 3 PP 7/2021):

- Usaha Mikro dengan modal usaha maksimal 1 Miliar,
- Usaha Kecil dengan modal usaha 5 Miliar – 10 Miliar,

Usaha Besar dengan modal usaha diatas 10 Miliar. Kemudahan OSS 1.1 perizinan berusaha tidak dibedakan berdasarkan risiko dan skala kegiatan usaha, sedangkan OSS-RBA perizinan berusaha dibedakan berdasarkan risiko dan skala kegiatan usaha sehingga memudahkan pelaku UMKM dengan tingkat usaha rendah untuk mengantongi perizinan berusaha dengan mudah.

Terpusat dan terintegrasi sebelumnya, dalam OSS 1.1 beberapa perizinan berusaha masih harus dilakukan melalui Kementerian atau Lembaga terkait atau pemerintah daerah. Sehingga, sistem OSS 1.1 belum benar-benar terpusat. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Purwakarta harus lah selalu berinovasi dalam meningkatkan Pelayanan publik sehingga sistem penyelenggaraan pelayanan pengaduan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan atau pihak pelapor/pengadu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Perizinan disusun dengan maksud dan tujuan:

- Untuk mewujudkan kepuasan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap layanan publik yang diberikan.
- Menciptakan rasa simpati dan kepercayaan terhadap penyelenggara pengelola penanganan pengaduan perizinan sehingga pihak penyelenggara publik dapat mengelola pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik serta terintegrasi.
- Menjadi acuan bagi penyelenggaraan pengelolaan pengaduan dalam mewujudkan kepuasan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

C. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan di Substansi Pengaduan diantaranya :

- Masyarakat sebagai penerima layanan publik;
- Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perizinan;
- Kelembagaan dan Sarana Pengaduan Pelayanan Perizinan;
- Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Perizinan;

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. PROFIL

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada Perizinan Dan Non Perizinan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

1. Visi Dan Misi

➤ VISI

Mewujudkan Purwakarta Istimewa

➤ MISI

- Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial.
- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional.
- Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.
- Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

➤ Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas-tugas yang diberikan kepada Daerah.

➤ Fungsi

- Perumusan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pemerintahan penanaman modal;
- Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan urusan pemerintahan penanaman modal;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan penanaman modal;

- Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan penanaman modal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. **Maklumat**

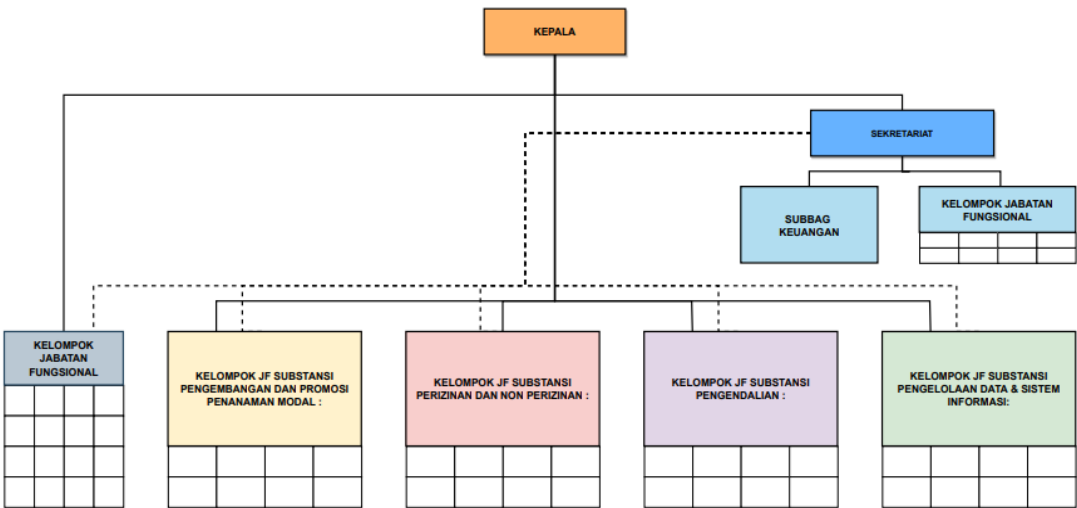
- Kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar Pelayanan
- Kami menyatakan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan
- Kami menyatakan bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar.

4. **Motto**

MOTTO DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Adalah:
 "Pelayanan Sepenuh Hati"

5. **Susunan Organisasi**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PURWAKARTA



6. **Kewenangan**

- Kewenangan DPMPTSP adalah:
- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ditingkat Pemerintah Kota;
 - Pemrosesan dan penandatanganan dokumen perizinan;
 - Penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon;
 - Penyederhanaan prosedur perizinan;

- e. Penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-sama unsur lain di lingkungan Pemerintah Kota;
- f. Penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara berkala/periodik (perbulan) dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

B. SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di Sub Substansi Pengaduan, sumber daya manusia masih sangat terbatas, anggaran maupun sarana dan prasarana. Adapun komposisi sumber daya tersebut sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Sub Substansi Pengaduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya disesuaikan dengan keahlian dan kompetensi.

Adapun kompetensi sumber daya manusia, terdiri atas :

- Sub Koordinator Sub Substansi Pengaduan merupakan pengendali atas pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
- Pengelola Pengaduan Publik merupakan petugas yang mengelola data pengaduan dengan melaksanakan pelayanan pengaduan dan melaksanakan penanganan pengaduan serta Menyusun rekapitulasi pengelolaan aspirasi dan pengaduan pelayanan public secara berkala.
- Petugas Pengelola Mal Pelayanan Publik bertugas menerima aspirasi pengaduan pelayanan publik, memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan dan menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan

Tabel 1 : Komposisi Substansi Pengaduan Berdasarkan Jabatan

NO	FUNGSI		JUMLAH
1	Sub Koordinator		1 Orang
2	Pelaksana	Analisis Pengaduan Publik	-
		Pengelola Pengaduan Publik	1 Orang
3	Petugas	Pengelola Pengaduan MPP	2 Orang

2. Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan tidak bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nama Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.480.000,- .

Tabel 2 : Alokasi Anggaran Penanganan Pengaduan

SEMESTER	TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) s.d SEMESTER II	PERSENTASE (%)
II	2022	69.480.000	67.560.000	97

3. Sarana dan Prasarana

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta menyediakan layanan “**GARDU PASTI**” (Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi), yang diantaranya :

- Penyampaian secara lisan atau tatap muka langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta.
- Melalui korespondensi atau surat menyurat yang dapat dimasukkan ke dalam kotak saran/pengaduan di tempat layanan tersedia atau ditujukan ke alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jl. Veteran No. 139 Kabupaten Purwakarta.
- Mengisi formulir GARDU PASTI di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta.
- Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id
- Website MPP Bale Madukara : mpp.purwakartakab.go.id
- E-mail DPMPTSP : ptsppurwakartakab@gmail.com
- E-mail MPP Bale Madukara : mppmadukara@gmail.com
- E-mail Pengaduan : pengaduanptsp139@gmail.com
- IG DPMPTSP : [dpmptsp.purwakarta](https://www.instagram.com/dpmptsp.purwakarta)
- IG MPP Bale Madukara : [mppmadukara](https://www.instagram.com/mppmadukara)
- Situs Media Online
- Saluran langsung pada telepon kantor (0264) 8224794

- SMS Gateway Pengaduan / Whatsapp (0818 09898222)
- Rapat Koordinasi
- Instruksi Pimpinan

Dan di dukung juga oleh sarana dan prasarana, antara lain :

Tabel 3 : Sarana Pendukung Pengaduan

NO	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	KONDISI
1	Komputer	2017	1 unit	Baik
2	HP Pengaduan	2020	1 unit	Baik
3	Formulir Pengaduan	2022	20 berkas	Baik

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN

A. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN

1. Status Penanganan Pengaduan Perizinan

Substansi Pengendalian DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dari mulai tanggal 1 Juli s.d 31 Desember 2022 telah menerima pengaduan perizinan sebanyak 9 permasalahan dengan status penanganan pengaduan perizinan sebagai berikut :

Tabel 4 : Status Penanganan Pengaduan Perizinan

NO	STATUS PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Selesai	9	100 %
2	Proses	-	-
	JUMLAH	9	100%

Diagram Status Penanganan Pengaduan Perizinan

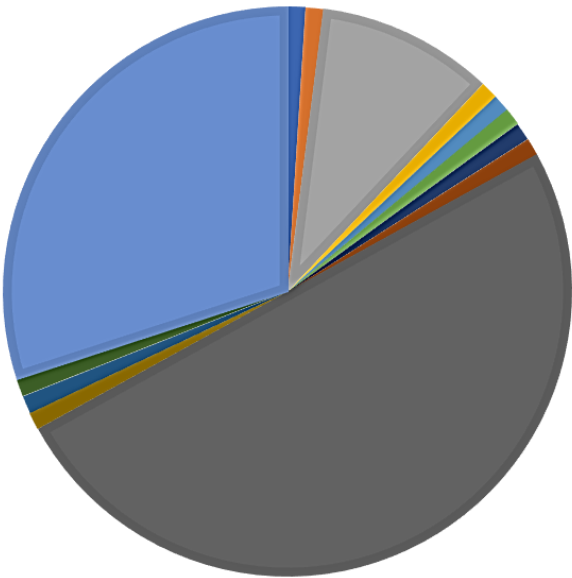


2. Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan

Berdasarkan pengaduan yang masuk ke DPMPTSP per saluran selama kurun waktu periode Juli s.d Desember tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar diagram dibawah ini :

Tabel 5 : Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan

NO	SALURAN PENGADUAN	JUMLAH
1	Tatap muka	-
2	Korespondensi / surat menyurat	-
3	Formulir Pengaduan	1
4	Website DPMPTSP	-
5	E-mail DPMPTSP	-
6	E-mail MPP Bale Madukara	-
7	Instagram (IG) DPMPTSP	-
8	Instagram (IG) MPP Bale Madukara	-
9	Situs Media Online	5
10	Telepon Kantor	-
11	SMS / Whatssapp	-
12	Rapat Koordinasi	-
13	Instruksi Pimpinan	3
	JUMLAH	9



Tabel 6 : Penanganan Pengaduan Perizinan

NO	TANGGAL PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KETERANGAN
										SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
1	31/08/2022	Media Online garisjabar.com	garisjabar.com https://www.garisjabar.com/bangunan-luar-di-atas-saluran-air-di-purwakarta-akibat-pelugus-laki-legas	Toserba Yogya Purwakarta	Jl. Jend. Sudirman No.5 Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengaduan masyarakat/media online garisjabar.com yang memuat tentang adanya bangunan liar berupa bangunan Gedung Toserba Yogya yang di bangun di atas aliran sungai Cigugur sehingga menutupi saluran air yang dapat mengakibatkan banjir serta tidak adanya ketegasan dari pihak yang benewang	7 September 2022 (Melaksanakan Pemeriksaan Lapangan ke Toserba Yogya Purwakarta)	5	V		Rapat Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan	Sesuai dengan No. BAP : PBN/03/K/D/2022 Tanggal 7 September 2022 dengan hasil : 1 Saat pemeriksaan lapangan pihak Legal Yogya tidak berada di lokasi sehingga pihak Yogya tidak dapat memperlihatkan dokumen pertizinannya 2 sesuai dengan pemberitaan bahwa benar adanya bangunan yang di bangun di atas Sungai Cigugur 3 Disarankan untuk segera berkoordinasi dengan PUT dan OPD Teknis serta segera melaporkan kegiatan usahanya 08 September 2022 Adanya konfirmasi dari pihak Yogya sesuai Nota Rapat dengan hasil : 1 Pihak Yogya akan berkoordinasi dengan Tim Legal Yogya dan PUT II 2 Harus memperbaharui surat perjanjian pemanfaatan lahan dan koordinasi dengan Dinas Teknis untuk revisi site plan 3 Akan mengadakan rapat lanjutan dengan mengundang pihak Legal Yogya, PUT, Bagian Hukum dan OPD Teknis	12 September 2022 1 Rapat pembahasan di hadir oleh unsur dari DPMPSTP, unsur dari DPUTR dan unsur dari Satpol PP 2 Melakukan pemeriksaan lapangan gabungan 3 Akan di lakukan rapat bersama dengan OPD teknis, Chief Legal Yogya dan PUT di Tanggal 13 September 2022 sesuai dengan No Berita Acara Rapat : PBN/04/D/D/2022 Tanggal 12 September 2022 13 September 2022 Rapat pembahasan di hadir oleh unsur dari DPMPSTP, unsur dari DPUTR, unsur dari Satpol PP, Bagian Hukum Setda serta Chief Legal Yogya, sesuai dengan No. BAP : PBN/03/K/D/2022 Tanggal 7 September 2022 yang berisi tentang : 1 Akan mengundang pihak PUT II secara resmi untuk di mintai keterangan PT. Alur Pratama harus menghadirkan Tim teknis design Bagian Hukum Setda dan Satpol PP siap melakukan pendampingan Akan di lakukan rapat lanjutan terkait permasalahan bangunan di atas aliran Sungai Cigugur pada tanggal 15 September 2022 dengan mengundang pihak dari Chief Legal Yogya dan BBWS 15 September 2022 Rapat pembahasan di hadir oleh unsur dari DPMPSTP, unsur dari DPUTR, unsur dari Satpol PP, Bagian Hukum Setda serta Chief Legal Yogya dan Perwakilan dari BBWS dengan hasil : 1 PT. Alur Pratama akan berkoordinasi dengan BBWS Citarum 2 Akan di lakukan identifikasi ulang terhadap seluruh dokumen perizinan yang berhubungan dengan bangunan tersebut sesuai peraturan undang-undang yang berlaku			V	Di lanjutkan di Bulan November 2022 (Triwulan IV)

NO	TANGGAL PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KETERANGAN
										SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
														3 Pihak Pemda dan PUT II menunggu hasil koordinasi dan konsultasi dari PT. Alur Pratama dengan BBWS Citarum 4 Akan di lakukan pertemuan kembali setelah ada hasil koordinasi dari BBWS 28 September 2022 Mendapatkan laporan dari DPUTR bahwa Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Purwakarta turun ke lapangan dan turut menangani permasalahan perluasan Toserba Yogya dengan hasil keputusan : tetap menunggu hasil kajian teknis dari BBWS terkait bangunan yang berada di atas saluran Sungai Cigalugur				
2	03/10/2022	Media Online	https://www.dinamika-nasional.com/2022/08/pengeblasan-bulu-ayam-di-keo-darangdan.html	Pabrik Pengolahan Bulu Ayam	Desa Depok Kec. Darangdan Kab. Purwakarta	Perizinan dan Non Perizinan	Bau menyengat dari pengolahan bulu ayam yang di produksi	10/10/2022	5	V		Pemeriksaan Lapangan	1 Adanya bau menyengat dari pengolahan bulu ayam yang di produksi 2 Di lokasi hanya ada karyawan saja dan terdapat mesin penggiling, oven pengering, boiler dan uap 3 limbah bulu di kirim dari Bandung dan langsung di olah, dikarenakan mesin rusak dan hujan berkepanjangan sehingga terjadi penumpukan bulu ayam yang belum di olah sehingga menyebabkan bau menyengat 4 Bulu ayam tersebut digunakan untuk pakan ayam sebagai bahan dasar protein 5 Pabrik belum memiliki izin 6 Diharapkan segera mengurus perizinan dan mengajukan PBG	1 Perizinan agar segera di tempuh 2 Perizinan harus sesuai dengan tata ruang untuk zona lokasi 3 Pengawasan berada di Dinas Teknis sesuai dengan No. BA : PBN05/CX/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 21 Oktober 2022 Menyampaikan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan ke OPD Teknis, dengan No. Surat : PM.06/08/10/26-Pengda/2022 Tanggal 21 Oktober 2022	V			
3	03/10/2022	Formulir Pengaduan	Muhamad Suberman	Bpk. AcengNR	Kp. Pesir Kihyang RT. 15/04 Desa Sadarkarya Kec. Darangdan Kab. Purwakarta	Perizinan dan Non Perizinan	Adanya kegiatan usaha tahu yang membuang limbah produksi tahu langsung ke sungai dan adanya pengeboran air sedalam 60m	10/10/2022	5	V		Pemeriksaan Lapangan	1 Pelaku usaha sudah memiliki izin usaha tetapi masih menggunakan izin yang lama 2 Terdapat kesalahan domisili perusahaan yang di buat oleh desa 3 Segera mengajukan perizinan yang baru ke MPP Bale Medukara dengan meminta pendampingan pegawai Teras Medukara Plered	1 Perizinan agar segera di tempuh 2 perizinan harus sesuai dengan tata ruang untuk zona lokasi 3 Pengawasan berada di Dinas Teknis sesuai dengan No. BA : PBN06/CX/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 21 Oktober 2022 Menyampaikan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan ke OPD Teknis, dengan No. Surat : PM.06/08/10/26-Pengda/2022 Tanggal 21 Oktober 2022	V			
4	24/10/2022	Media Olne	Facebook : Kang Dedi Mulyadi dan Youtube : https://youtu.be/ogysMEBvGE	Irsan Supladi	Dusun I RT. 008/RW 002 Desa Cijantung Kec. Sukatani Kab. Purwakarta	Lainnya	Adanya cut and fill tanah yang di buang ke luar daerah dan pengelolaannya tidak sesuai dengan pelaksanaan teknis	24/10/2022	1	V		Koordinasi	Melakukan koordinasi dengan Substansi Perizinan dan Dinas Satpol PP, dengan hasil : 1 Mengumpulkan data perizinannya dan hasilnya semua data perizinan sudah di tempuh	V				

NO	TANGGAL PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KETERANGAN
										SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
													2 Permasalahan tersebut telah di tindak lanjut oleh Satpol PP dan Dinas Teknis di tanggal itu juga					
5	Tindak lanjut tanggal 15 September 2022	Media Online garisjabar.com	garisjabar.com https://www.garisjabar.com/bangunan-luar-di-situs-saluran-air-di-purwakarta-akibat-petugas-tak-tegas	Toserba Yogya Purwakarta	Jl. Jend. Sudirman No.5 Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Tindak lanjut permasalahan Toserba Yogya	03/11/2022	12		V	Surat tindak lanjut	Membuat surat tindak lanjut pemertkasan lapangan untuk di sampaikan ke OPD teknis, dengan No. Surat : PM/1085-Pengdis/2022 Tanggal: 03 November 2022		V			
6	04/11/2022	Instruksi Pimpinan	Inspekturat	Toserba Yogya Purwakarta	Jl. Jend. Sudirman No.5 Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Menperanyakan tentang permasalahan Toserba Yogya yang telah di tindaklanjuti oleh DPMTSP	04/11/2022	1	V		Koordinasi	1 Koordinator Substansi Pengendalian memaparkan permasalahan yang telah di tindak lanjut oleh DPMTSP 2 Rapat permasalahan Toserba Yogya akan di tindak lanjut dan di ambil alih oleh Inspekturat	Inspekturat akan melakukan kajian teknis terkait permasalahan perluasan toko di atas aliran Sungai Cigugur		V		Koordinasi di laksanakan di Inspekturat Di lanjut di tanggal 29/11/2022
7	08/11/2022	Instruksi Pimpinan	PT. Akur Pratama	Toserba Yogya Purwakarta	Jl. Jend. Sudirman No.5 Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentasi proyek perluasan Toserba Yogya Purwakarta dalam rangka merideklanjuti permasalahan bangunan toko yang berada di atas Sungai Cigugur	08/11/2022	1	V		Rapat Pembahasan	Rapat di pimpin oleh Koordinator Substansi Pengendalian dengan di hadir oleh Analis AKAM Sub Substansi Perizinan II dan unsur dari pegawai Substansi Pengendalian, dengan hasil : 1 PT. Akur Pratama mempresentasikan proyek perluasan Toko dengan beberapa usulan yang di sampaikan berupa relayase gedung 2 Pihak Pemda sepakat menunggu hasil keputusan dari BBWS 3 Pihak PJT II hanya sebagai pelaksana teknis keputusan sepenuhnya di serahkan kepada BBWS 4 Permasalahan akan di tangani oleh Inspekturat 5 DPMTSP tidak berwenang mengambil keputusan apapun	1 Menunggu hasil keputusan rapat koordinasi antara PT. Akur Pratama dengan BBWS pada tanggal 11 November 2022 2 Menunggu hasil kajian dari Inspekturat 3 PT. Akur Pratama agar tetap berkoordinasi dengan DPMTSP terkait hasil keputusan dari BBWS	V			Ekspose di laksanakan di DPMTSP
8	16/11/2022	Berita Media Online	RMOLJABAR REPUBLIK MERDEKA	Mie Gacoan	Jl. Taman Pahlawan No. 43B, Nagrikuler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta Jawa Barat- 41118	Perizinan dan Non Perizinan	Belum mengantongi izin tetapi telah beroperasi	24/11/2022	6	V		Sidak Insidental	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Gabungan bersama OPD Teknis ke Gera! Mie Gacoan Purwakarta yang sedang beroperasi sesuai dengan BAP Satpol PP No : 503/7.BAP Pengawasan/Gakda/2022 Tanggal 24 Nopember 2022 dengan hasil : pihak manajemen tidak akan melakukan aktivitas usaha sebelum semua perizinan selesai, apabila telah akan siap memperlunggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku	26 November 2022 Gera! Mie Gacoan Purwakarta beroperasi kembali dan launching di tanggal 25 November 2022 sehingga pihak Satpol PP melakukan sidak ke lapangan dengan melakukan penutupan gerai dan ternyata di tanggal yang sama pihak miegacoan membuka kembali usahanya pada jam 15.00 WIB sehingga ada perintah dari Kasat untuk di tindak kembali di tanggal 28 November 2022 28 November 2022 1 Melaksanakan rapat intem bersama OPD teknis di Kantor Satpol PP Purwakarta untuk menyamakan persepsi	V			

NO	TANGGAL PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG MELAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KETERANGAN
										SEBUAI SOP	TIDAK SEBUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
														2. Rapat pembahasan bersama dengan KasalPol dan memanggil pihak manajemen MieGacoan untuk di mintai keterangan karena telah beroperasi kembali, dengan hasil sepakat untuk menutup kegiatan usaha miegacoan sampai dengan pertemuannya selesai 3. Melaksanakan sidak insidental dan melakukan pengecekan sementara lokasi usaha miegacoan sampai dengan pertemuannya selesai				
9	Lanjutan dari rapat di Inspektoral tanggal 4/11/2022	Instruksi Pimpinan	Inspektoral	Toserba Yogya Purwakarta	Jl. Jend. Sudirman No.5 Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Tindak lanjut permasalahan Toserba Yogya yang di tangani oleh Inspektoral	29/11/2022	17		V	Rapat Pembahasan	Rapat Pembahasan lanjutan di Inspektoral bersama dengan pihak Legal Toserba Yogya dengan hasil masih tetap menunggu kajian dari BBWS	1. Rekomendasi bersama : Agar pihak PT. Atur Pratama berkoordinasi dengan BBWS Pusat dan Kementerian PUPR Pusat 2. Permasalahan Toserba Yogya ini di tindak lanjut oleh Inspektoral	V			Rapat Pembahasan di Inspektoral

KETERANGAN :

1. SELESAI	:9
2. BELUM SELESAI	:0
3. TIDAK SELESAI	:0
TOTAL	:9

Purwakarta, 30 Desember 2022

KOORDINATOR SUBSTANSI PENGENDALIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGADUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

RD. HERI LUKMAN YUSUP, SH
NIP. 19651017 196302 1 001

Mengetahui :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

UNIGA KENCANA, S.Pd
NIP. 19790201 200601 2 001

HARMAN BUDI ANGGORO, ST, MT
NIP. 19760805 200501 1 013

B. HAMBATAN

Hambatan dalam pelaksanaan penanganan permasalahan pengaduan di Semester II tahun 2022 diantaranya yaitu :

1. Kurang optimalnya Penanganan Pengaduan Perizinan dalam pelaksanaan sosialisasi pengenalan media Penanganan Pengaduan Perizinan sehingga banyak masyarakat atau pelaku usaha yang tidak mengetahui;
2. Kurangnya staf dan keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan;
3. Belum adanya pelatihan khusus terkait Penanganan Pengaduan Perizinan.
4. Kanal pengaduan yang dikelola belum sepenuhnya optimal.
5. Pengaduan yang diterima tidak terkait dengan masalah perizinan dan non perizinan.

C. UPAYA PENYELESAIAN

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan penanganan pengaduan diantaranya:

1. Koordinasi dengan pimpinan dalam hal pengoptimalan anggaran;
2. Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media;
3. Membentuk tim khusus di internal DPMPTSP dan Tim Gabungan dengan instansi teknis terkait;
4. Telah tersedianya kanal GARDU PASTI di Mall Pelayanan Publik Bale Madukara;
5. Melakukan koordinasi secara rutin terkait validasi data pengaduan oleh masing-masing petugas layanan pengaduan;
6. Mekanisme koordinasi dengan OPD teknis dilakukan melalui mekanisme rapat tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan penanganan pengaduan perizinan ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan dalam menangani permasalahan pengaduan masyarakat atau pelaku usaha di Kabupaten Purwakarta.

Penanganan Pengaduan Perizinan ini ditangani oleh Substansi Pengendalian sub Substansi Pengaduan beserta Tim Teknis terkait. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan Semester II di tahun 2022 sebanyak 9 permasalahan dengan status permasalahan selesai 100%.

Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

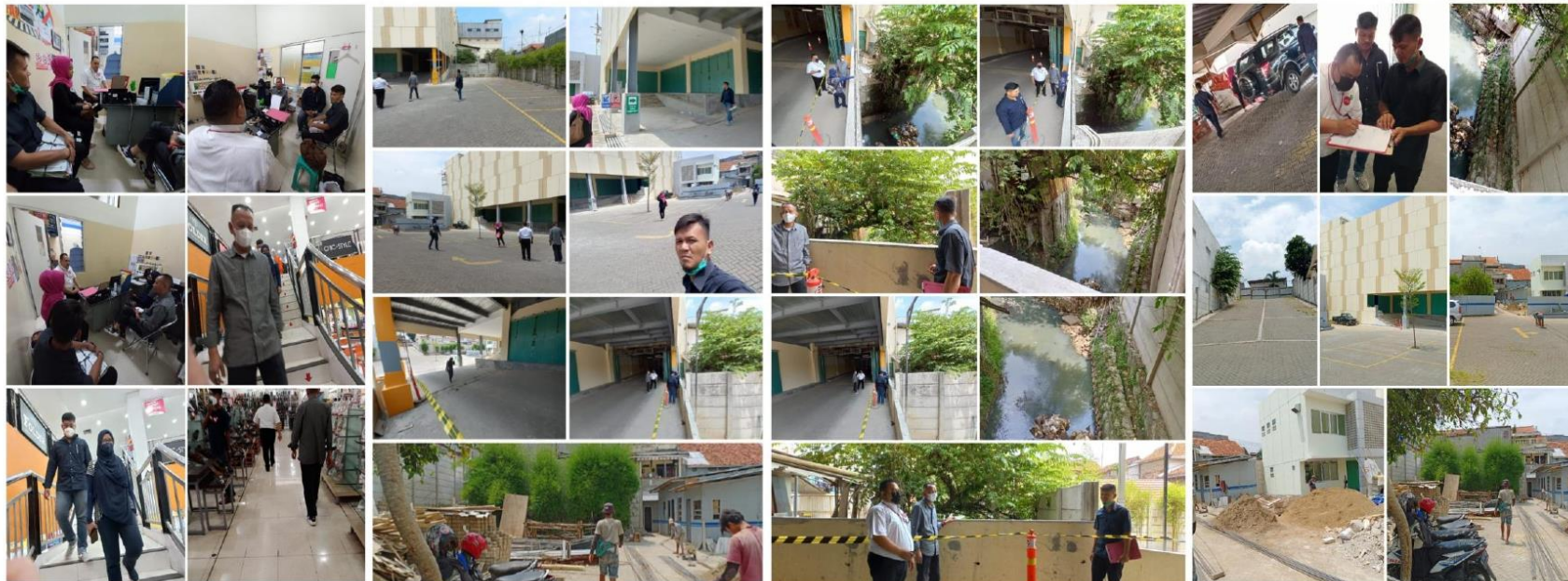
B. SARAN

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penanganan pengaduan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

**DOKUMENTASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER) TAHUN 2022**

**PEMERIKSAAN LAPANGAN KE PT. AKUR PRATAMA
(YOGYA DEPT. STORE)
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 5 KEL. NAGRITENGAH KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA
(RABU / 7 SEPTEMBER 2022)**



**TINDAK LANJUT KLARIFIKASI HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOSERBA YOGYA (PT. AKUR PRATAMA) YANG BERADA DI ATAS ALIRAN SUNGAI CIGALUGUR
RUANG RAPAT SUBSTANSI PERIZINAN
(KAMIS / 8 SEPTEMBER 2022)**



PEMERIKSAAN LAPANGAN GABUNGAN DENGAN OPD TEKNIS KE PEMBANGUNAN GEDUNG TOSERBA YOGYA PURWAKARTA YANG BERADA DI ATAS SUNGAI CIGALUGUR
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 5 KEL. NAGRITENGAH KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA
(SENIN / 12 SEPTEMBER 2022)



**RAPAT PEMBAHASAN GABUNGAN BERSAMA OPD TEKNIS
PERHAL PEMBANGUNAN GEDUNG TOSERBA YOGYA (PT. AKUR PRATAMA) YANG BERADA DI ATAS ALIRAN SUNGAI CIGALUGUR DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN KOTA PURWAKARTA
RUANG RAPAT DPMPTSP
(SENIN / 12 SEPTEMBER 2022)**



**RAPAT EVALUASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN USAHANYA
PERIHAL TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN GABUNGAN BERSAMA OPD TEKNIS DAN CHIEF LEGAL YOGYA PURWAKARTA ATAS PEMBANGUNAN GEDUNG TOSERBA
YOGYA PURWAKARTA (PT. AKUR PRATAMA) YANG BERADA DI ATAS ALIRAN SUNGAI CIGALUGUR
RUANG RAPAT DPMPPTSP
(SELASA / 13 SEPTEMBER 2022)**



RAPAT EVALUASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN USAHANYA
 PERIHAL TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN GABUNGAN BERSAMA OPD TEKNIS, CHIEF LEGAL YOGYA
 DAN PERUM JASA TIRTA II TERKAIT PEMBANGUNAN GEDUNG TOSERBA YOGYA PURWAKARTA (PT. AKUR PRATAMA) YANG BERADA DI ATAS ALIRAN SUNGAI CIGALUGUR
 RUANG RAPAT DPMPPTSP
 (KAMIS / 15 SEPTEMBER 2022)



KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPRD KOMISI III BERSAMA DENGAN DPUR KE TOSERBA YOGYA PURWAKARTA TERKAIT PEMBANGUNAN GEDUNG
TOSERBA YOGYA PURWAKARTA (PT. AKUR PRATAMA) YANG BERADA DI ATAS ALIRAN SUNGAI CIGALUGUR
(RABU / 28 SEPTEMBER 2022)



DOKUMENTASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) TAHUN 2022

FORMULIR PENGADUAN SDR. MUHAMAD SULAEMAN
PERIHAL ADANYA PEMBUANGAN LIMBAH TAHU YANG MERESAHKAN MASYARAKAT
KP. PASIR KIHAYANG RT.15 RW. 04 DESA SADARKARYA KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA
(3 OKTOBER 2022)

FORMULIR PENGADUAN TERPADU PERIZINAN DAN INVESTASI

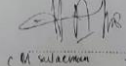
DATA PEMBERI ADUAN

Nama: MUHAMAD SULAEMAN
Jenis Kelamin: Laki-laki
Alamat Rumah: KP. PASIR KIHAYANG RT.15 RW. 04 DESA SADARKARYA KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA
Pekerjaan/Instansi: J. PAKSI SEMPIT - DESA KEMANGSIH KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA
Alamat Kantor: J. PAKSI SEMPIT - DESA KEMANGSIH KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA
Email: 82146503090000
No. KTP: 0847-2140-7928
No. Telp:

JENIS PENGADUAN

Jenis Aduan/Unsur: Kegiatan usaha tahu yang membuang limbah produksi tahu yang langsung ke sungai
Tujuan Pengaduan: Supaya kegiatan tersebut dihentikan
Sumber Informasi: Masyarakat setempat
Data Pendukung: ☒ Ya ☐ Tidak
Cara Menyampaikan Aduan: ☒ Langsung langsung ☐ Surat ☐ Pos ☐ E-mail ☐ Pukimisi

Purwakarta, 03-10-2022

Perugas Pemeriksa: 
NIP: 
Pemberi Aduan: MUHAMAD SULAEMAN



PEMERIKSAAN LAPANGAN KE PRODUKSI PENGOLAHAN TAHU
DESA SADAR KARYA KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA
(SENIN / 10 OKTOBER 2022)



Dinamika Nasional

[HOME](#)
[BERITA](#)
[HEADLINE](#)
[KURSI](#)
[ULAN RASA](#)



BERITA

PENGELOLAAN BULU AYAM DI KEC. DARAGAN DI KELUHAN WARGA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI MINTA TINDAK TEGAS

20/02/2022



Purnawati/Dinamika Nasional

Aspek pengelolaan bulu ayam di petak 400 hektar di Kecamatan Daragan, Kabupaten Pangkajene-Andone Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, mendapat perhatian Dinas Lingkungan Hidup yang sangat penting.



Dinamika Nasional

[HOME](#)
[BERITA](#)
[HEADLINE](#)
[KURSI](#)
[ULAN RASA](#)

Isu ini sangat mendapat perhatian karena bulu ayam merupakan limbah organik yang mengandung protein yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selain itu, bulu ayam juga dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Namun, jika bulu ayam tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan penyakit.

Salah satu keluhan warga Kecamatan Daragan, Kabupaten Pangkajene-Andone Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah bau yang tidak sedap yang timbul dari petak 400 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup yang sangat penting.



Salah satu keluhan warga Kecamatan Daragan, Kabupaten Pangkajene-Andone Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah bau yang tidak sedap yang timbul dari petak 400 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup yang sangat penting.

Sampel bulu ayam dari petak 400 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup akan dikirim ke laboratorium.

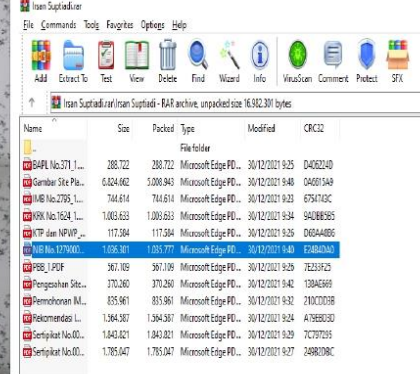
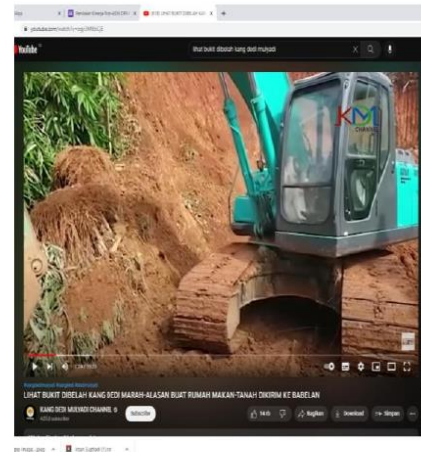
Penulis: M. Subianto



PENGECEKAN LAPANGAN DAN BERKAS SITE PLAN TOSERBA YOGYA PURWAKARTA
YANG BERADA DI ATAS ALIRAN SUNGAI CIGALUGUR OLEH KEPALA DPMTSP BESERTA JAJARANNYA
(JUM'AT / 21 OKTOBER 2022)



HASIL KOORDINASI DENGAN SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI PERIZINAN DAN SATPOL PP BESERTA BUKTI PERIZINAN YANG SUDAH DI TEMPUH OLEH IRSAN SUPTIADI
(SELASA / 25 OKTOBER 2022)



EKSPOSE REKAYASA PERLUASAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOSERBA YOGYA PURWAKARTA OLEH PT. AKUR PRATAMA
RUANG RAPAT DPMTSP
(SELASA / 08 NOVEMBER 2022)



RAPAT BERSAMA INSPEKTORAT TERKAIT TINDAK LANJUT PERMASALAHAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOSERBA YOGYA PURWAKARTA (PT. AKUR PRATAMA) YANG BERADA DI ATAS ALIRAN SUNGAI CIGALUGUR
(SELASA / 29 NOVEMBER 2022)



EKSPOSE REKAYASA PERLUASAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOSERBA YOGYA PURWAKARTA OLEH PT. AKUR PRATAMA
RUANG RAPAT DPMPSTP
(SELASA / 08 NOVEMBER 2022)



RAPAT BERSAMA INSPEKTORAT TERKAIT TINDAK LANJUT PERMASALAHAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOSERBA YOGYA PURWAKARTA (PT. AKUR PRATAMA) YANG BERADA DI ATAS ALIRAN SUNGAI CIGALUGUR
(SELASA / 29 NOVEMBER 2022)



**RAPAT INTERNAL TERKAIT GERAI MIE GACOAN YANG BEROPERASI KEMBALI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. PURWAKARTA
(SENIN / 28 NOVEMBER 2022)**



**PENYEGELAN GERAI MIE GACOAN
JL. TAMAN PAHLAWAN NO. 43B NAGRI KALER KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA
(SENIN / 28 NOVEMBER 2022)**



RAPAT BERSAMA INSPEKTORAT TERKAIT TINDAK LANJUT PERMASALAHAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOSERBA YOGYA PURWAKARTA (PT. AKUR PRATAMA) YANG BERADA DI ATAS ALIRAN SUNGAI CIGALUGUR
(SELASA / 29 NOVEMBER 2022)





PENGADUAN TERPADU PERIZINAN & INVESTASI